



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Nomor : **413** /BUA.1/OT.01.1/10/2017
Lampiran : Satu lembar
Hal : langkah – langkah penyelesaian pagu minus belanja pegawai
Tahun Anggaran 2017

17 Oktober 2017

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Di - Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2017 Pasal 55 ayat (1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang melekat pada gaji, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut ;

- Selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program.
- Dalam hal sisa anggaran pada satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program.
- Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran
- Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam (satu) bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui Bagian Anggaran 998.08 (BA BUN).

Petunjuk Teknis Penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA 2017 adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama melakukan estimasi kekurangan dan kelebihan belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2017 per akun belanja pegawai.
- Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan estimasi kekurangan/kelebihan belanja pegawai TA 2017 ke masing - masing Pengadilan Tingkat Banding.
- Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan rekapitulasi estimasi kekurangan/kelebihan belanja pegawai TA 2017 dengan satker – satker dibawahnya paling lambat tanggal **24 Oktober 2017** ke email anggaranrenog@gmail.com
- Dalam hal revisi pagu minus belanja pegawai dapat dipenuhi antar satker dalam satu korwil maka revisi tersebut dapat diajukan pada kanwil DJPB, satker dapat melakukan revisi tersebut dengan melampirkan surat Persetujuan Revisi Eselon 1.
- Dalam hal revisi pagu minus belanja pegawai tidak dapat dipenuhi antar satker dalam satu korwil, maka revisi akan diusulkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi ke Direktorat Jenderal Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Joko Upoyo Pribadi

Tembusan :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Kepala Badan Urusan Adminstrasi MA RI
- Kepala Badan Pengawasan MA RI
- Kepala Biro Keuangan BUA MA RI

**REKAPITULASI PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI DIPA TA. 2017
SATKER**

NO.	KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA			
			PAGU ANGGARAN	JUMLAH NETO S/D BLN DESEMBER	SISA ANGGARAN	KEKURANGAN ANGGARAN
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
9	511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
10	511129	Belanja Uang Makan PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
11	511147	Belanja Tunj.Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
12	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
13	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)
14	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
15	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
16	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
		JUMLAH	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX)